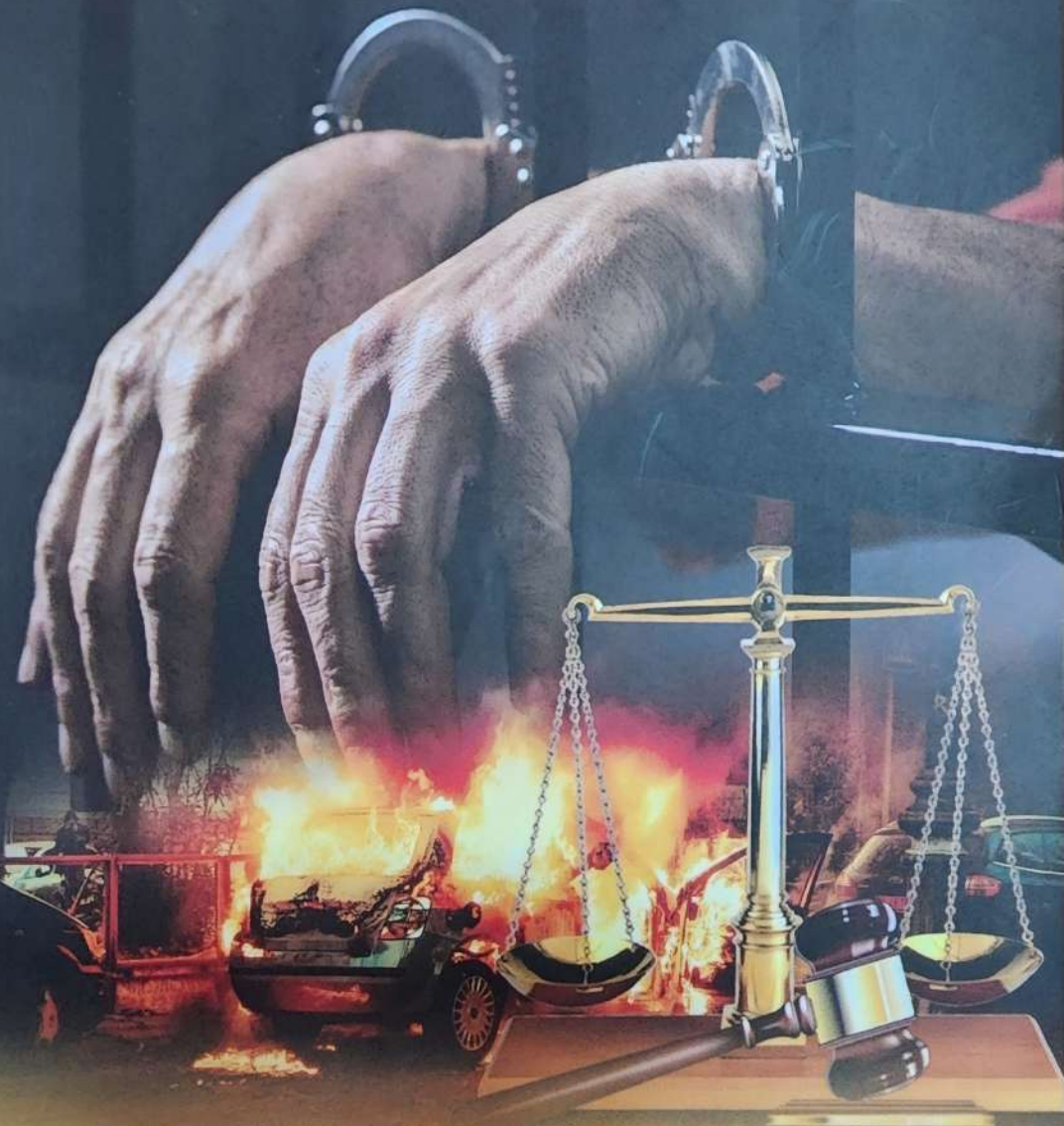


Penyunting : M. Aris Munandar, S.H., M.H.

# HUKUM PIDANA TERORISME

(Hakikat Sanksi Dan Pengaturan Terorisme Di Indonesia)



Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H.

# HUKUM PIDANA TERORISME

**(Hakikat Sanksi dan Pengaturan Terorisme di Indonesia)**

*Copyright © 2022 By Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H.*

*All rights reserved*

ISBN: 978-623-5389-76-9

15 x 23 cm, xiv + 118 halaman

Cetakan ke-1, Juli 2022

Penulis : **Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H.**  
Penyunting : **M. Aris Munandar, S.H., M.H.**  
Desain Sampul : **Papong Kreatif**  
Tata Letak : **Ainur Rochmah**  
Editor Naskah : **Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.**  
Sumber Gambar : <https://www.freepik.com/>

Diterbitkan Oleh:

**PENERBIT KBM INDONESIA**

Banguntapan, Bantul-Jogjakarta (Kantor I)

Balen, Bojonegoro-Jawa Timur, Indonesia (Kantor II)

081357517526 (Tlpn/WA)

Website : [www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)  
<http://toko.penerbitbukujogja.com>  
Email : [karyabaktimakmur@gmail.com](mailto:karyabaktimakmur@gmail.com)  
Youtube : Penerbit Sastrabook  
Instagram : @penerbit.sastrabook  
@penerbitbukujogja

**Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)**

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
Tanpa izin dari penerbit





## *Kata Pengantar Penulis*

---

*Alhamdulillahirabbil Alaamiin. Syukur tiada hentinya penulis ucapkan atas Nikmat yang telah Allah Subhanu Wataala berikan kepada penulis. Tak juga Shalawat atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Allahumma Salli Alaa Sayyidina Muhammad.*

Buku yang berada ditangan pembaca ini berjudul "**HUKUM PIDANA TERORISME (Hakikat Sanksi dan Pengaturan Terorisme di Indonesia)**". Kejahatan Terorisme tidak habisnya diperbincangkan oleh seluruh kalangan. Kejahatan terorisme ini memiliki ciri khusus dan motif dikarenakan perbuatan terorisme didasarkan pada pemikiran yang radikal.

Buku yang berada di tangan pembaca membahas tentang Tindak Pidana Terorisme, baik dari hakikat sanksi pidana bagi terorisme sampai dengan rekonstruksi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang penulis tawarkan sehingga nantinya bisa dijadikan acuan atau referensi dalam melakukan revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Akhir kata, buku ini penulis persembahkan kepada para pembaca yang budiman. Tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih atas doa dari kedua orang tua (Dian Anggraece Sigit Parawansa dan Syarif Ibrahim) yang tidak pernah putusya kepada penulis. Terimakasih juga kepada Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, dan Prof.Dr. Irfan Idris, MA selaku Direktur Deradikalisasi Badan



Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, yang telah berkenan memberikan sambutan dalam buku ini.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca yang budiman. Penulis menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam buku ini terdapat kekeliruan atau kekurangan. Karena kesempunaan hanyalah milik Allah Rabbul Alaamiin.

Penulis

ttd.

**Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H.**



# Daftar Isi

---

SAMBUTAN | vii

Rektor Universitas Hasanuddin

SAMBUTAN | ix

Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan  
Terorisme Republik Indonesia

KATA PENGANTAR PENULIS | xi

DAFTAR ISI | xiii

- A. Konsep Rekonstruksi | 1
- B. Konsep Sanksi | 5
- C. Aspek Aksiologi dalam Pemberantasan  
Tindak Pidana Terorisme | 13
- D. Tindak Pidana Terorisme | 19
- E. Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak  
Pidana Terorisme | 25
- F. Sanksi Pidana | 61
- G. Sanksi Tindakan | 89

DAFTAR PUSTAKA | 103

BIODATA PENULIS | 113

BIODATA PENYUNTING | 115





## A. Konsep Rekonstruksi

Kata rekonstruksi berasal dari dasar kata dalam bahasa Inggris yaitu *'construction'* yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu *'konstruksi'* yang berarti keseluruhan bangun (an) yang terdiri dari bagian-bagian struktur.<sup>1</sup> Kata rekonstruksi ini lalu mendapat awalan *'re'* yang berarti membangun kembali bagian-bagian atau struktur.

Menurut *Black Law Dictionary Series 10*, *re-construction* yaitu *the act or process of rebuilding, recreating, or recognizing interpreting or explaining the meaning of a writing the ascertainment of a documents sense in accordance with established*

---

<sup>1</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses via <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/Nkonstruksi.html>.





## Daftar Pustaka

---

### BUKU:

- Abdurrahman. *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979.
- Ali, Masyhar. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Anwar, Yesmil dan Adang. *Pembaharuan Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana*, PT Gramedia, Jakarta, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan*  
 ----- *RUU KUHP Baru : Bua Restrukturisasi / Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.
- *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Krminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Benn, Philip. *Punishment: A Philosophical and Criminological Inquiry*. Martin Robertson, Oxford, 1981.
- Bentham, Jeremy. *Introduction to the Priciples of Morals and Legislation*. Basil Blackwell, Oxford, 1960.
- Bertens, K. *Filsuf-Filsuf Besar tentang Manusia*, Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- Campbell, Henry. *Black Law Dictionary Tenth Edition*, California, 2015.







- Cragg, Wesley. *The Practical Punishment: Towards a Theory of Restorative Justice*. Routledge. London, New York. 1992.
- Chstiansen, Karl O. *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Resource Policy, Resource Material Series No.7 UNAFEI, Tokyo, 1974.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 ; Stelsel Pidana, Teori- teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo. Jakarta. 2002.
- Darmaputera, Eka. *Pancasila Identitas dan Modernitas : Tinjauan Etis dan Budaya*, Gunung Mulia, Jakarta, 1997.
- Garner, Bryan. A. *Black Law Dictionary Tenth Edition*, Thomson Reuters, California, 2014.
- Gunawan, Yopi dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama, Bandung, 2015,
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia : Dari Retribusi Ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- H.B. Vos. *Leerboek van Nederlands Strafrecht*, Haarlem; H.D. Tjeenk Willink, 1950.
- Hiariej, Eddy O.S. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum (Cetakan ke-15)*, Kanisius, Yogyakarta, 2010. Jahroni, Jajang dan Jamhari Makruf (Ed). *Memahami Terorisme : Sejarah*,
- Jonkers, J.E. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kaligis, O.C. *Terorisme Tragedi Umat Manusia*, O.C..Kaligis & Associates, Jakarta. 2000.







- Koeswadi, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Loeqman, Loebby. *Analisis Hukum dan Perundang-undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*. Universitas Indonesia, Jakarta. 1990.
- Lubis, Todung Mulya dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas, Jakarta, 2009.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta (Cetakan Ketujuh), 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penulisan Hukum (Edisi Revisi)*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019
- . *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Dilengkapi dengan Empat Undang-undang di bidang Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Ketiga)*, Kencana Group, Jakarta, 2017.
- . *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Ohoitumur, Yong. *Teori Etika tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford





- Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2006
- Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Purbacaraka, Purwadi dan Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Rajawali, Jakarta, 1989,
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014.
- Reksodiputro, Marjono B. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia), Jakarta, 1994.
- Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- *Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.
- Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1992.
- Saptomo, Ade. *Hukum dan Kearifan Lokal*, Grasindo, Jakarta, 2009.
- Setiardja, A. Gunawan. *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Simongkir, J.C.T, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta, 2017.
- Subekti dan Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*, Prandya Paramita, Jakarta, 1980
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.







-----, *Suatu Diema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Hukum Pidana, pada Universitas Diponegoro, Semarang, 21 Desember 1974.*

Soejono. *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1984.

Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Syam, Muhammad Noor. *Pancasila Ditinjau dari Segi Historis, Segi Yuridis Konstitusional dan Segi Filosofis*, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang, 1981.

Utrech, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tintamas, Surabaya, 1987

Walker, Nigel. *Sentencing in a Rational Society*, Basic Books, Inc, Publishers, New York, 1971.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Wibowo, Ari. *Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Widjaja, A.W. *Perkuliahan Pancasila*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1991.

Wreksosuhardjo, Sunarjo. *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Andi, Yogyakarta, 2001.

Zaidan, M. Ali, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Zulfa, Eva Achjani, dkk. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasarakatan*, Rajawali Press, Depok, 2017





### **JURNAL/ARTIKEL ILMIAH:**

- Candra, Septa. *"Restorative Justice : Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia"*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2 No. 2, Agustus 2013,
- Griffithstst, John. *"Ideology in Criminal"*, The Yale Journal, Vol.79 Number 3, Januari 1970,
- Paulus, Loudewijk F. *"Terorisme"*, Buletin Balitbang Dephan, Vol. V Nomor 8 Tahun 2002, <http://buletinlitbang.dephan.go.id>, diakses 5 Oktober 2016, jam 17.56
- Seto, Theodore. *"The Morality of Terrorism"*, USA Vol. 35. Research Paper No.2002-29, 2002.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlaku UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1660)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614)
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights tanggal 28 Oktober 2005. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558)
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan







Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris. (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4616)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Ratifikasi United Nations of Transnational Organized Crime (UNTOC 2000) tanggal 12 Januari 2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4960)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164)

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406)

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 *tentang* Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4283)  
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216)

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5359) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan





Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846)

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6417)

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 832) tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat,

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282)

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Napi/Tahanan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 tanggal 23 April 2010 tentang Prosedur Tetap Perlakuan Napi Resiko Tinggi







Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 1, PAS-205.PK.01.05.10 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembimbingan Klien Kasus Terorisme.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang dalam Tindak Pidana Korupsi

### LAMAN:

Anonim, Collins Thesaurus of the English Language-Complete and Unabridged 2nd Edition, Harpers Collins Publishers, 2002, diakses via <http://www.thefreedictionary.com>, pada 10 Mei 2020,

Anonim. Problem Akut Penindakan Terorisme di Indonesia, diakses via <https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2014/01/14/14804/problem-akut-penindakan-terorisme-di-indonesia.html>, pada 21 Maret 2017, jam 11.21

Ahmad Sofian. Pidana Denda sebagai Alternatif atas Penjara yang Penuh Sesak, diakses via <http://business-law.binus.ac.id/2016/09/27/pidana-denda-sebagai-alternatif-atas-penjara-yang-penuh-sesak/> pada 26 September 2018, jam 19.15

Evandy, Aristo. Tugas Pembaharuan Hukum Pidana, diakses via [https://www.academia.edu/9244757/TUGAS\\_PEMBAHARU\\_AN\\_HUKU\\_M\\_PIDANA](https://www.academia.edu/9244757/TUGAS_PEMBAHARU_AN_HUKU_M_PIDANA), pada 20 Juni 2019, jam 20.32





10. Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, dan Aborsi (Suatu Refleksi, Teoretis, dan Empiris) tahun 2021;
11. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Merintanggi Penyelenggaraan Keкарantinaan Kesehatan di Kota Makassar tahun 2021.

Penyunting juga sering menulis di media online maupun cetak, serta mengikuti berbagai kompetisi kemahasiswaan baik dalam skala regional maupun nasional. Prestasi yang pernah penyunting raih yaitu Berkas Terbaik Kompetisi Perancangan Undang-Undang (*Legislative Drafting*) yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2017, Juara 2 Musikalisasi Puisi yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Mahasiswa Bidikmisi Universitas Hasanuddin tahun 2017, Juara 3 Kompetisi Karya Tulis Ilmiah Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2018, Juara 1 Lomba Cipta Puisi dalam Semarak Milad 21 Tahun Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) tahun 2019, Contributor Terpilih Lomba Cipta Puisi Nasional yang diselenggarakan oleh Penerbit Jendela Sastra Indonesia tahun 2020, Top 10 Pemakalah Pada Seminar Nasional dan *Call Paper* Lembaga Penulisan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung tahun 2020, serta menjadi finalis di beberapa kompetisi kemahasiswaan lainnya.

Penyunting dapat dihubungi melalui via e-mail: [m.arismunandar85@yahoo.co.id](mailto:m.arismunandar85@yahoo.co.id).



# HUKUM PIDANA TERORISME

(Hakikat Sanksi Dan Pengaturan Terorisme Di Indonesia)

Buku ini memberikan sebuah argumentasi hukum terkait tindak pidana terorisme. Hadimnya buku ini diharapkan mampu menjadi salah satu bahan referensi dalam menilik setiap fenomena dan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Mengingat semakin maraknya penyebaran paham-paham terorisme di masyarakat Indonesia secara masif dan sistematis, sehingga sangat diperlukan pencerdasan kepada masyarakat agar terhindar dari hal tersebut.

Buku "**Hukum Pidana Terorisme: Hakikat Sanksi dan Pengaturan Terorisme di Indonesia**" juga menguraikan beberapa aspek terkait hukum pidana. Seperti konsep sanksi, sanksi tindakan, sanksi pidana, aksiologi dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dan lain sebagainya.

Sasaran pembaca buku ini antara lain mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan seluruh pegiat hukum. Sehingga sangat direkomendasikan untuk memiliki buku ini sebagai petunjuk teknis dalam menangkal paham terorisme. Berdasarkan hal di atas, maka kami berharap segenap kritik dan saran terhadap tulisan ini untuk kesempurnaannya. Meskipun penulis juga sangat menyadari bahwasanya tiada karya tulis yang sempurna di dunia ini. Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum.



**Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H.** lahir di Surabaya, 16 Oktober 1991. Saat ini penulis berprofesi sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan reviewer di beberapa jurnal. Berbagai tulisan/artikel telah diterbitkan baik ditingkat jurnal nasional maupun internasional bereputasi. Adapun buku yang telah diterbitkan oleh penulis yaitu, *Hukum Pidana dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain* (2020) dan *Vezameling Van Inlandsche Wetten : Koleksi Hukum Pribumi* (2022). Penulis dapat dihubungi melalui email, [ivanparawansa@gmail.com](mailto:ivanparawansa@gmail.com).